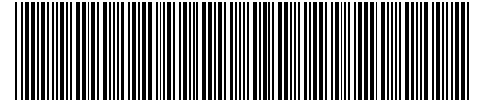




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.578851/2026**



DS:1059-3805-4048-7509

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

**Revisi ke 01**

Tanggal : 24 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
  2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
  3. Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
  4. Kode>Nama Satker : (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
- Sebesar : Rp. 69.732.000 ( ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 69.732.000  
Rp. 69.732.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	69.732.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A L U (051) Rp. 69.732.000

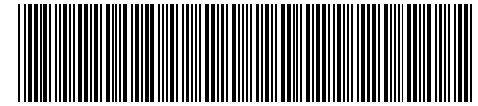
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2026  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1059-3805-4048-7509

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Halaman : I A. 1

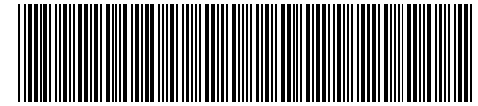
Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			69.732.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			69.732.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	12.000.000
Rincian Output	:	01	AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	12.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	218.000
Rincian Output	:	01	BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1,00	Perkara	218.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	33.216.000
Rincian Output	:	01	QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96,00	Orang	33.216.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	24.298.000
Rincian Output	:	01	QCA.002 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PN)	1,00	Perkara	24.298.000

Jakarta, 01 Desember 2025  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



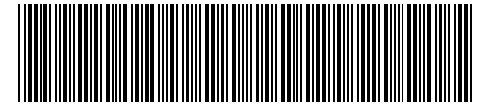
DS:1059-3805-4048-7509

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
578851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	-	69.732	-	-	-	69.732		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	69.732	-	-	-	69.732		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	69.732	-	-	-	69.732		
1059.AEA	Koordinasi (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	12.000	-	-	-	12.000	18.51	
01	RM	-	12.000	-	-	-	12.000	051	
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	218	-	-	-	218	18.51	
01	RM	-	218	-	-	-	218	051	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	33.216	-	-	-	33.216	18.51	
01	RM	-	33.216	-	-	-	33.216	051	
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	24.298	-	-	-	24.298	18.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1059-3805-4048-7509

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU  
Kewenangan : (KD)

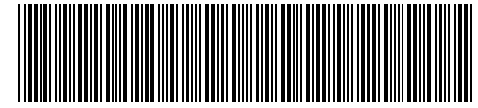
Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	24.298	-	-	-	24.298	051	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>69.732</b>	-	-	-	<b>69.732</b>		

Jakarta, 01 Desember 2025  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2026  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1059-3805-4048-7509

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH  
Kode>Nama Satker : (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	578851	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU</b>														
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	6.053	69.732
		<b>BELANJA BARANG</b>	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	6.053	69.732
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	6.053	69.732
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	6.053	69.732
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	1.882	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.772	1.764	22.266
		- PNBP (425231)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20
		- PNBP (425232)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	240	2.000
		- PNBP (425233)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	300	200	4.500
		- PNBP (425239)	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.314	15.746

Jakarta, 01 Desember 2025  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2026  
IV A. B L O K I R**



DS:1059-3805-4048-7509

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [578851] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

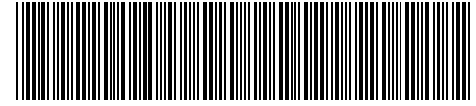
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2026  
IV B. C A T A T A N**



DS:1059-3805-4048-7509

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH  
Kode dan Nama Satker : [578851] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775